


PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PADA ORGANISASI PUBLIK

Adelia Amri¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹⁻²
Email : adeliaamri73@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id²

<p>Menerima: 28/12/2025</p> <p>Diterima: 29/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 30/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>The development of Management Information Systems (MIS) has become a critical component in enhancing operational performance and modernizing public sector administration. As public organizations face increasing pressure to deliver transparent, accountable, and high-quality services, MIS serves not only as a technological upgrade but also as a strategic governance mechanism. This journal critically examines the role of MIS in improving transparency, strengthening financial and administrative accountability, and elevating service delivery standards within public institutions. Utilizing a descriptive qualitative approach supported by literature analysis, the study underscores that technology alone is insufficient to generate meaningful institutional improvement. The findings reveal that the successful implementation of MIS is largely determined by the integration of three core dimensions: technological infrastructure, human resource capacity, and policy alignment. Without organizational readiness, cultural adaptation, and adequate digital competence, MIS adoption risks becoming a symbolic formality with limited operational impact. Accordingly, continuous capacity building, user-centered system design, and strong leadership commitment are required to ensure sustainability. The study concludes that MIS should be viewed not merely as a digital reporting platform, but as a transformational instrument capable of reshaping public management practices toward greater efficiency, transparency, and responsiveness to public needs.</i></p> <p>Keywords: Management Information Systems; Operational Efficiency; Public Organizations; Digital Transformation.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem terstruktur yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020), SIM adalah kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta prosedur yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi kepentingan manajerial. Dengan kata lain, SIM tidak hanya merupakan perangkat teknologi, tetapi sebuah ekosistem informasi yang menunjang manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi.

Dalam era digital saat ini, organisasi publik menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tuntutan tersebut mencakup kecepatan pelayanan, transparansi proses, kemudahan akses informasi, serta pertanggungjawaban yang lebih jelas terhadap penggunaan sumber daya publik. Di sisi lain, birokrasi publik masih sering menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti proses administrasi yang lambat, data yang tidak terintegrasi, duplikasi dokumen, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi masyarakat dan kemampuan institusi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam konteks inilah pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi hambatan birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (Arianto et al., 2025)

SIM dalam organisasi publik tidak hanya berperan sebagai alat otomatisasi administrasi, tetapi sebagai instrumen transformasi manajemen. Implementasi SIM memungkinkan integrasi data lintas unit kerja, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akurasi pelaporan, serta penyediaan informasi real-time untuk kebutuhan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, SIM berpotensi memperkuat aspek akuntabilitas publik melalui pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua implementasi SIM berjalan sesuai harapan. Banyak proyek SIM di instansi pemerintah mengalami hambatan atau bahkan gagal sepenuhnya. Penyebab utamanya bukan semata kekurangan teknologi, melainkan pendekatan implementasi yang terlalu teknosentris—lebih menekankan perangkat keras dan perangkat lunak—tanpa memperhatikan kesiapan organisasi, budaya kerja digital, tata kelola kelembagaan, dan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena pengembangan dan penerapan SIM dalam konteks organisasi publik. Pendekatan ini memberikan ruang analitis untuk mengkaji bagaimana teknologi, sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan kebijakan saling berinteraksi dalam membentuk dinamika implementasi SIM. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pengembangan SIM yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi publik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong transformasi digital sektor publik secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem terintegrasi yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Menurut Laudon dan Laudon (2020), SIM menggabungkan unsur manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur kerja untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Dalam organisasi publik, SIM berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

O'Brien dan Marakas (2019) menegaskan bahwa SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperbaiki proses manajerial. Dwiyanto (2018) menyebutkan bahwa penerapan SIM merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi digital dan resistensi terhadap perubahan sering menjadi kendala implementasi. (Safari et al., 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. SIM mengombinasikan teknologi informasi, prosedur kerja, basis data, serta sumber daya manusia untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dalam organisasi modern, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai pendukung pengambilan keputusan strategis. Keberadaan SIM memungkinkan manajemen memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja organisasi, mengidentifikasi permasalahan secara dini, serta merumuskan kebijakan berbasis data. Dengan

demikian, SIM menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. (Sriwijayanti, 2021)

2. Efisiensi operasional

Efisiensi operasional merujuk pada kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, baik dari segi waktu, biaya, tenaga kerja, maupun teknologi. Konsep ini menekankan pada pengurangan pemborosan (waste) dan peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas layanan atau output organisasi. Dalam konteks manajemen, efisiensi operasional dicapai melalui penyederhanaan proses kerja, standarisasi prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sistem Informasi Manajemen berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses, mempercepat aliran informasi, dan meminimalkan kesalahan manusia. Oleh karena itu, efisiensi operasional menjadi indikator penting keberhasilan penerapan sistem informasi dalam mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan. (Lestari, 2025)

3. Organisasi Publik

Organisasi publik adalah institusi yang dibentuk oleh negara atau pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Berbeda dengan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan, organisasi publik lebih menekankan pada pencapaian kepentingan umum, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, organisasi publik sering menghadapi tantangan seperti birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi publik menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas kinerja. SIM memungkinkan organisasi publik mengelola data dan informasi secara lebih sistematis dan mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. (Tuama, 2025)

4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan menyeluruh dalam organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan nilai layanan. Transformasi ini tidak hanya mencakup adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan pada proses bisnis, struktur organisasi, serta budaya kerja. Dalam konteks organisasi publik, transformasi digital bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sistem Informasi Manajemen menjadi fondasi utama dalam transformasi digital karena berperan sebagai pengelola dan penyedia informasi yang terintegrasi. Melalui transformasi digital berbasis SIM, organisasi publik dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional pada organisasi publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena secara holistik, termasuk konteks organisasi, interaksi antaraktor, serta dinamika perubahan yang terjadi selama proses implementasi SIM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada output teknologi, tetapi juga pada aspek manusia, kebijakan, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi sektor publik.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur, meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan evaluasi sistem informasi, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transformasi digital dan manajemen informasi sektor publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan melakukan proses kategorisasi, identifikasi pola, perbandingan antar temuan, serta interpretasi kritis berdasarkan kerangka teori yang relevan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai strategi pengembangan SIM yang efektif, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk penguatan tata kelola sistem informasi di lingkungan organisasi publik. (Asih et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional pada organisasi publik, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, pengurangan kesalahan administratif, dan peningkatan koordinasi antarunit kerja. Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan bahwa keberhasilan penerapan SIM sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan organisasi. Dalam konteks ini, SIM bukan hanya sekadar perangkat teknologi, tetapi telah berkembang menjadi tulang punggung sistem informasi organisasi yang memungkinkan aliran data berjalan secara efisien, terstruktur, dan terdokumentasi. Transformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai strategis memberi manfaat besar dalam mendukung keunggulan kompetitif dan pencapaian tujuan organisasi publik. (Arif & Firmansyah, 2024)

Dalam hal efisiensi operasional, pengembangan SIM memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama, seperti pengarsipan data, manajemen surat-menyurat, pengelolaan kepegawaian, hingga penyusunan laporan keuangan tahunan. Otomatisasi tersebut tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga menekan biaya operasional dan mengurangi potensi kesalahan manusia (human error). Misalnya, implementasi e-government dalam berbagai instansi publik telah membuktikan bahwa digitalisasi sistem informasi dapat mempercepat pelayanan masyarakat secara signifikan, memperbaiki mekanisme transparansi anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi.

Selain itu, SIM berperan penting dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Melalui mekanisme pelaporan digital, dashboard kinerja, dan integrasi data real-time, pimpinan organisasi mampu mengevaluasi tren operasional, memetakan hambatan, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan kebutuhan publik. Dengan demikian, SIM tidak hanya memfasilitasi proses administratif, tetapi juga memperkuat fungsi manajerial strategis dalam organisasi publik. (Sriwijayanti, 2021)

Meskipun manfaat SIM terbukti sangat signifikan, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan multidimensi. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam tinjauan literatur adalah resistensi pengguna (user resistance). Transisi dari sistem manual ke sistem digital seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan penolakan di kalangan pegawai, terutama apabila mereka merasa tidak memiliki kompetensi digital yang memadai atau khawatir terhadap perubahan pola kerja. Kondisi ini diperparah apabila tidak ada komunikasi perubahan yang efektif atau kebijakan transisi digital tidak didukung oleh pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. (Lusiana et al., 2019)

Selain resistensi pengguna, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak instansi publik, terutama di daerah, mengalami kesenjangan kemampuan teknis sehingga SIM hanya digunakan pada level input data, tanpa memanfaatkan fitur analitik atau sistem integrasi data secara optimal. Faktor lainnya adalah kebutuhan akan infrastruktur yang andal, terutama akses jaringan, server penyimpanan data yang aman, serta perangkat keamanan siber yang memadai untuk melindungi data sensitif organisasi.

Tantangan penting lainnya adalah kebutuhan akan kebijakan pendukung yang jelas dan konsisten. Implementasi SIM akan sulit berhasil apabila tidak terdapat regulasi internal dan standar operasional prosedur yang selaras dengan sistem digital. Data dari studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa banyak organisasi publik mengalami kegagalan dalam implementasi SIM bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena tidak adanya keselarasan antara struktur organisasi, tata kelola, dan desain sistem. (Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila, 2024)

Dari Aspek Teknologi, sistem Informasi Manajemen (SIM) terbukti memainkan peran fundamental dalam mentransformasikan mekanisme kerja birokrasi yang sebelumnya bersifat manual, lambat, dan rawan kesalahan menjadi sistem yang terstruktur, otomatis, dan terintegrasi. Implementasi berbagai platform digital seperti e-Office, e-Government, Electronic Document Management System (EDMS), Enterprise Resource Planning (ERP) sektor publik, serta sistem pelaporan berbasis daring telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas manajemen informasi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, proses pencatatan, pemrosesan, dan distribusi informasi dapat dilakukan lebih cepat, efisien, serta minim duplikasi pekerjaan. Digitalisasi ini tidak hanya memperbaiki proses operasional, tetapi juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui jejak audit elektronik (digital audit trail). (Asnida et al., 2020)

Integrasi data antarunit kerja melalui basis data terpusat juga menciptakan ekosistem informasi yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Hal ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan strategis, di mana akses informasi yang akurat dan real-time menjadi kebutuhan mendasar. Dengan adanya interoperabilitas data, pimpinan instansi dapat melakukan analisis berbasis bukti (evidence-based policy) secara lebih cepat dan tepat sasaran. Keberadaan fitur otomatisasi seperti workflow automation, task reminder, dan document tracking semakin meningkatkan kecepatan alur kerja serta meminimalkan hambatan administratif. (Anisa Rahmatia H. Palowa, Felmi D. Lantowa, 2021)

Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam SIM masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, terutama antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Banyak instansi publik di daerah belum memiliki akses jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, ataupun dukungan sistem keamanan informasi yang kuat. Kondisi ini menyebabkan penerapan SIM tidak dapat berjalan optimal dan menimbulkan kesenjangan digital (digital divide) dalam proses transformasi birokrasi.

Selain itu, isu keamanan siber menjadi perhatian utama dalam implementasi SIM. Dengan meningkatnya penggunaan layanan berbasis jaringan, risiko kebocoran data, serangan malware, peretasan, serta penyalahgunaan akses meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, organisasi publik dituntut untuk menerapkan sistem perlindungan data yang komprehensif melalui enkripsi data, autentikasi berlapis, backup berkala, serta kebijakan tata kelola data yang sesuai standar seperti ISO/IEC 27001.

Tidak kalah penting, keberlanjutan teknologi dalam SIM memerlukan dukungan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala agar tetap kompatibel dengan kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi. Ketergantungan pada sistem lama (legacy system) yang tidak lagi kompatibel sering menjadi penghambat inovasi dan integrasi sistem baru. (Awudu et al., 2024)

Dari Sisi Sumber Daya Manusia, efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat ditentukan oleh kompetensi, kesiapan, serta sikap mental pengguna sistem dalam menghadapi perubahan digital. Meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia, SIM tidak akan memberikan manfaat optimal apabila pegawai sebagai pengguna utama tidak memiliki keterampilan teknis dan pemahaman konseptual yang memadai terkait penggunaan sistem. Berbagai literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan implementasi SIM di sektor publik adalah rendahnya tingkat literasi digital pegawai, kurangnya pengetahuan mengenai fungsi sistem, dan minimnya kesadaran mengenai urgensi transformasi digital dalam birokrasi.

Selain itu, permasalahan resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan yang sering muncul dalam proses digitalisasi. Pegawai yang telah terbiasa bekerja dengan prosedur manual dalam jangka waktu lama cenderung merasa tidak nyaman atau bahkan menganggap digitalisasi sebagai ancaman terhadap stabilitas pekerjaan mereka. Kondisi tersebut dapat memunculkan sikap pasif, penolakan tersembunyi, hingga ketidakinginan untuk menggunakan sistem secara optimal. Oleh karena itu, penerapan SIM membutuhkan pendekatan manajemen perubahan (change management) yang strategis dan terencana. (Lestari, 2025)

Pelaksanaan pelatihan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesiapan pegawai. Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali pada fase awal implementasi, tetapi harus berlangsung secara periodik untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan pembaruan sistem. Bentuk pendampingan seperti bimbingan teknis, helpdesk, konsultasi teknis, serta peer-learning dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, organisasi perlu memastikan adanya dokumentasi sistem, SOP digital, serta panduan penggunaan yang mudah dipahami untuk memudahkan proses pembelajaran secara mandiri.

Pembentukan budaya kerja digital juga menjadi elemen fundamental dalam mendukung efektivitas SIM. Budaya kerja yang adaptif, terbuka terhadap inovasi, dan berbasis data akan meningkatkan penerimaan sistem oleh pegawai. Pimpinan organisasi memainkan peran penting sebagai penggerak budaya digital dengan memberikan dukungan, keteladanan, serta memastikan proses penilaian kinerja berkaitan dengan pemanfaatan SIM secara konsisten. (Arjun Riyadi & Dyah Palupiningtyas, 2024)

Dari Aspek Kebijakan dan Kepemimpinan, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat ditentukan oleh dukungan manajemen puncak serta arah kebijakan yang jelas dan terukur. Kepemimpinan yang memiliki visi transformasi digital menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam birokrasi publik yang umumnya memiliki struktur hierarki kuat dan budaya kerja yang cenderung prosedural. Tanpa adanya komitmen kepemimpinan yang kuat, implementasi SIM sering berakhir hanya sebagai formalitas administratif atau proyek teknologi tanpa kontribusi nyata terhadap efektivitas layanan publik. (Budhiningsih, 2023)

Pimpinan organisasi publik harus mampu berperan sebagai change leader, bukan hanya sebagai pengambil keputusan. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan internal, strategi digital, serta regulasi operasional selaras dengan tujuan implementasi SIM. Hal ini

mencakup penyusunan aturan penggunaan sistem, penyediaan anggaran yang memadai, alokasi sumber daya pendukung, serta pengawasan berkala terhadap efektivitas sistem. Beberapa studi menunjukkan bahwa instansi yang berhasil menerapkan SIM umumnya memiliki mekanisme evaluasi sistem yang berkelanjutan, baik melalui audit teknologi, survei pengguna, maupun penilaian kinerja berbasis indikator digital. (Analytics, 2025)

Selain komitmen kebijakan, aspek desain sistem berbasis kebutuhan pengguna (user-centered design) menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sistem benar-benar berfungsi sebagai alat bantu kerja, bukan beban tambahan. Banyak implementasi SIM di sektor publik mengalami hambatan karena sistem dibangun secara top-down tanpa mempertimbangkan alur kerja dan kebutuhan pegawai di lapangan. Dengan melibatkan pengguna sejak tahap perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi, organisasi dapat memastikan sistem yang dibangun relevan, mudah digunakan, dan sesuai dengan konteks operasional. (Saputri et al., 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) memainkan peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional pada organisasi publik. Implementasi SIM tidak hanya mempercepat proses administrasi dan pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi data, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta memperkuat transparansi dalam aliran informasi. Melalui pemanfaatan SIM, organisasi publik mampu menciptakan mekanisme kerja yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terukur, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data yang valid.

Namun demikian, keberhasilan implementasi SIM tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Efektivitas sistem sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, termasuk tingkat literasi digital, penerimaan terhadap perubahan, serta kemampuan adaptasi terhadap sistem baru. Selain itu, dukungan kebijakan dan komitmen manajemen puncak menjadi faktor penentu agar SIM dapat diterapkan secara berkelanjutan dan tidak hanya sekadar simbol modernisasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. S. (2023). Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia. *Substansi*, 1(2), 280–309.
- Hermawati, D., Sri, A., & Hutagaol, R. (2024). *Social Sciences Insights Journal*. *Social Sciences Insights Journal*, 2687(Falk 2017), 78–86.
- Karepouwan, C. A. (2025). The Role Of Regional Government Information Systems (Sipd) In Increasing Financial Accountability And Transparency In Paniai Regency Abstrak Pendahuluan Berbagai Aspek Pemerintahan , Termasuk Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah . *Revolusi Data (Tumija & . 6(1)*, 11–21.
- Lestari, P. A. (2025). Transparency And Accountability In The Digital Era : Insights From Public. *Sinergi International Journal Of Accounting & Taxation*, 3(3), 195–208.
- Maisarah, P. A., Fonna, F., & Rayyan, F. (2025). Peran Kritis Sistem Informasi Manajemen Dalam Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan. 6(3).
- Melia Syahfitri, Arnida Wahyuni Lubis, M. A. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei

- Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan) Imelia. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 4(1), 9–15.
- Raharjo, B., Sarjito, A., & Duarte, E. P. (2024). Implementation Of The Internal Control System In Increasing The Accountability Of The Financial Reports. *Formosa Journal Of Social Sciences (Fjss)*, 3(4), 1035–1048.
- Rosalinda, A., Aulia, F., Hikmatu Syifa, M., & Robiatul Hadawiyah, S. (2025). The Role Of Public Sector Accounting In Realizing Accountability And Transparency In Local Government Financial Management: A Case Study Of The Jakarta Provincial Government. *International Journal Of Asian Business And Development (Metropolis)*, 1(3), 157–168. <https://Mtiformosapublisher.Org/Index.Php/Metropolis>
- Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Emayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 3036–3040.
- Saputri, A., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2022). Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.24967/ekombis.V7i2.1810>
- Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.V7i1.6>
- Tuama, A. J. (2025). The Role Of Electronic Governance And Its Impact On Accounting Systems. *Journal Of Public Policy & Governance*, 9(1), 107–117. <https://doi.org/10.53819/81018102t5380>